



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450

TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 51/Siaran Pers/AL/LI.04.01/11/2019

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 28 November 2019

KY Usulkan Enam CHA dan Empat CHAd hoc pada MA ke DPR

Jakarta (Komisi Yudisial) – Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyerahkan enam calon hakim agung (CHA) dan empat calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung (MA) ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Kamis (28/11) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta.

Keenam CHA tersebut adalah: Soesilo (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin) untuk kamar Pidana, Dwi Sugiarto (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar) dan Rahmi Mulyati (Panitera Muda Perdata Khusus pada MA) untuk kamar Perdata, H. Busra (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang) untuk kamar Agama, Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (Hakim Militer Utama Dilmiltama) untuk kamar Militer, dan Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim) untuk kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak.

Para calon hakim *ad hoc* Tipikor pada MA yang diusulkan tersebut, yaitu: Agus Yuniato (hakim *ad hoc* Tipikor Tingkat Pertama pada PN Surabaya) dan Ansori (hakim *ad hoc* Tipikor Tingkat Banding pada PT Sulawesi Tengah).

Sementara calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial pada MA, yaitu: Willy Farianto (advokat) dari unsur Apindo dan Sugianto (Hakim *ad hoc* PHI pada PN Semarang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh).

Penetapan kelulusan tersebut berdasarkan rapat pleno KY yang dihadiri Pimpinan dan Anggota KY, Selasa (19/11) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta.

Kesemuanya dinyatakan lulus serangkaian tes yang diselenggarakan KY mulai seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan termasuk rekam jejak, dan wawancara akhir. Selanjutnya, keenam CHA dan keempat calon hakim *ad hoc* pada MA tersebut dimintakan persetujuan kepada DPR untuk ditetapkan sebagai hakim agung dan hakim *ad hoc* pada MA oleh Presiden.

Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara, menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara, dan menetapkan calon hakim agung yang lolos wawancara. Selanjutnya diputuskan kelulusan seleksi calon hakim agung dengan mempertimbangkan nilai pada tahap sebelumnya.

Usulan jumlah CHA yang diusulkan ke DPR tidak memenuhi jumlah yang diminta MA, yakni sebanyak 11 hakim agung dengan rincian: 3 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar

Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 4 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.

Begitupun dengan usulan jumlah calon hakim *ad hoc* pada MA yang berjumlah sembilan orang dengan rincian: tiga hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada MA dan enam hakim *ad hoc* Hubungan Industrial pada MA. Hal tersebut dilakukan KY untuk menjaga kualitas dan integritas para calon yang diusulkan ke DPR.

Tentunya KY berharap, DPR RI melalui Komisi III DPR RI dapat menyetujui calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada MA untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

KY telah mengembangkan dan membangun Model dan Standar Kompetensi Hakim Agung sesuai dengan langkah-langkah ilmiah yang memadai. Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mendapatkan model dan standar kompetensi.

Di tahun 2018, KY telah melakukan evaluasi terhadap kamus kompetensi hakim agung yang telah digunakan dalam kurun waktu 2 tahun. Berangkat dari evaluasi tersebut, KY melakukan validasi kamus kompetensi dengan melibatkan hakim agung, sehingga tersusun kamus kompetensi yang lebih operasional, yaitu memadatkan dari 7 kelompok kompetensi menjadi 4 kelompok kompetensi dan dari 28 kompetensi menjadi 12 kompetensi.

Rumah kompetensi hakim agung ini diharapkan dapat menghasilkan pilihan calon hakim agung terbaik yang sesuai dengan kebutuhan MA dan sistem peradilan Indonesia.

Jaja Ahmad Jayus

Ketua Komisi Yudisial

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id email:

humas@komisiyudisial.go.id

KY USULKAN 6 CALON HAKIM AGUNG KE DPR

11

Jumlah Kebutuhan

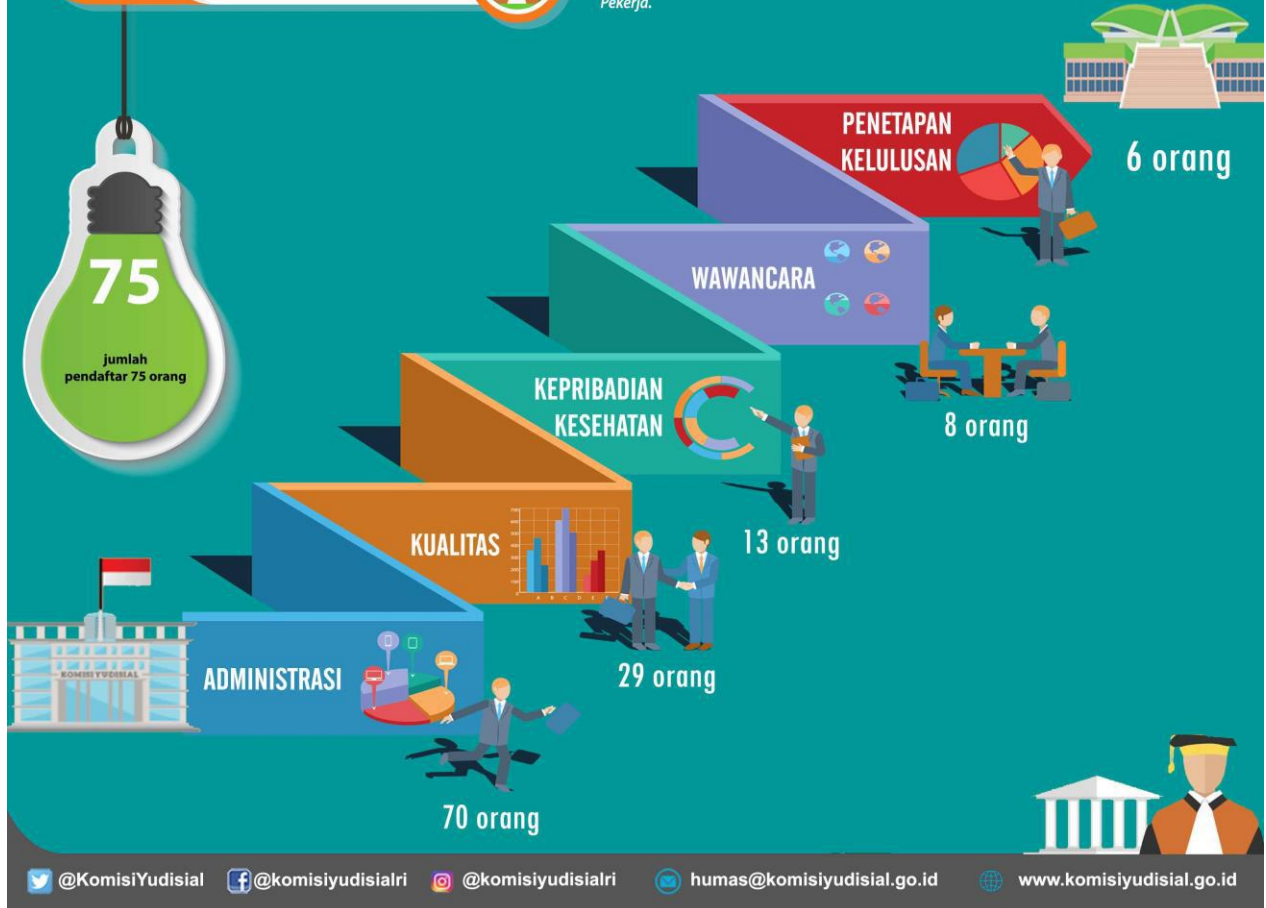
1 Kamar Agama 2 Kamar Militer
4 Kamar Perdata 1 Kamar TUN
3 Kamar Pidana



Seleksi calon hakim agung dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Surat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019. Surat tersebut merevisi surat sebelumnya sehingga kekosongan hakim agung dan hakim ad hoc di MA menjadi 11 (sebelas) Hakim Agung yang terdiri: 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Pidana, 4 (empat) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, 1 (satu) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 2 (dua) Hakim Agung Kamar Militer; 3 (tiga) Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung; dan 6 (enam) Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang terdiri dari 3 (tiga) unsur APINDO dan 3 (tiga) unsur Serikat Buruh/Serikat Pekerja.



75
jumlah
pendaftar 75 orang





PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 19 November 2019, dihasilkan 6 (enam) calon hakim agung, 2 (dua) calon hakim ad hoc Tipikor pada MA dan 2 (dua) calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA di bawah ini dinyatakan lulus seleksi wawancara yang akan dimintakan persetujuan kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung adalah sebagai berikut:



Soesilo, SH. MH

Semarang, 22 September 1961
Jabatan : Hakim Pengadilan Tinggi
Banjarmasin
Profesi : Hakim
Bidang Kompetensi : Pidana
Pendidikan Terakhir : Magister



Drs. H. Busra, S.H., M.H

Padang, 24 Juni 1956
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Kupang
Profesi : Hakim
Bidang Kompetensi : Agama
Pendidikan Terakhir : Magister



Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Jakarta, 5 Januari 1962
Jabatan : Hakim Pengadilan Tinggi
Denpasar
Profesi : Hakim
Bidang Kompetensi : Perdata
Pendidikan Terakhir : Doktor



Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Kebumen, 20 Desember 1965
Jabatan : Hakim POKIMILTAMA
Dilmiltama
Profesi : Hakim
Bidang Kompetensi : Militer
Pendidikan Terakhir : Magister



Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Bukittinggi, 7 Desember 1959
Jabatan : Panitera Muda Perdata
Khusus pada MA
Profesi : Hakim
Bidang Kompetensi : Perdata
Pendidikan Terakhir : Doktor



Dr Sartono, S.H., M.H., M.Si

Singkawang, 14 Februari 1953
Jabatan : Wakil Ketua III Pengadilan
Pajak RI Bidang Pembinaan
dan Pengawasan Kinerja Hakim
Profesi : Hakim
Bidang Kompetensi : Tata Usaha Negara
(khusus pajak)
Pendidikan Terakhir : Doktor

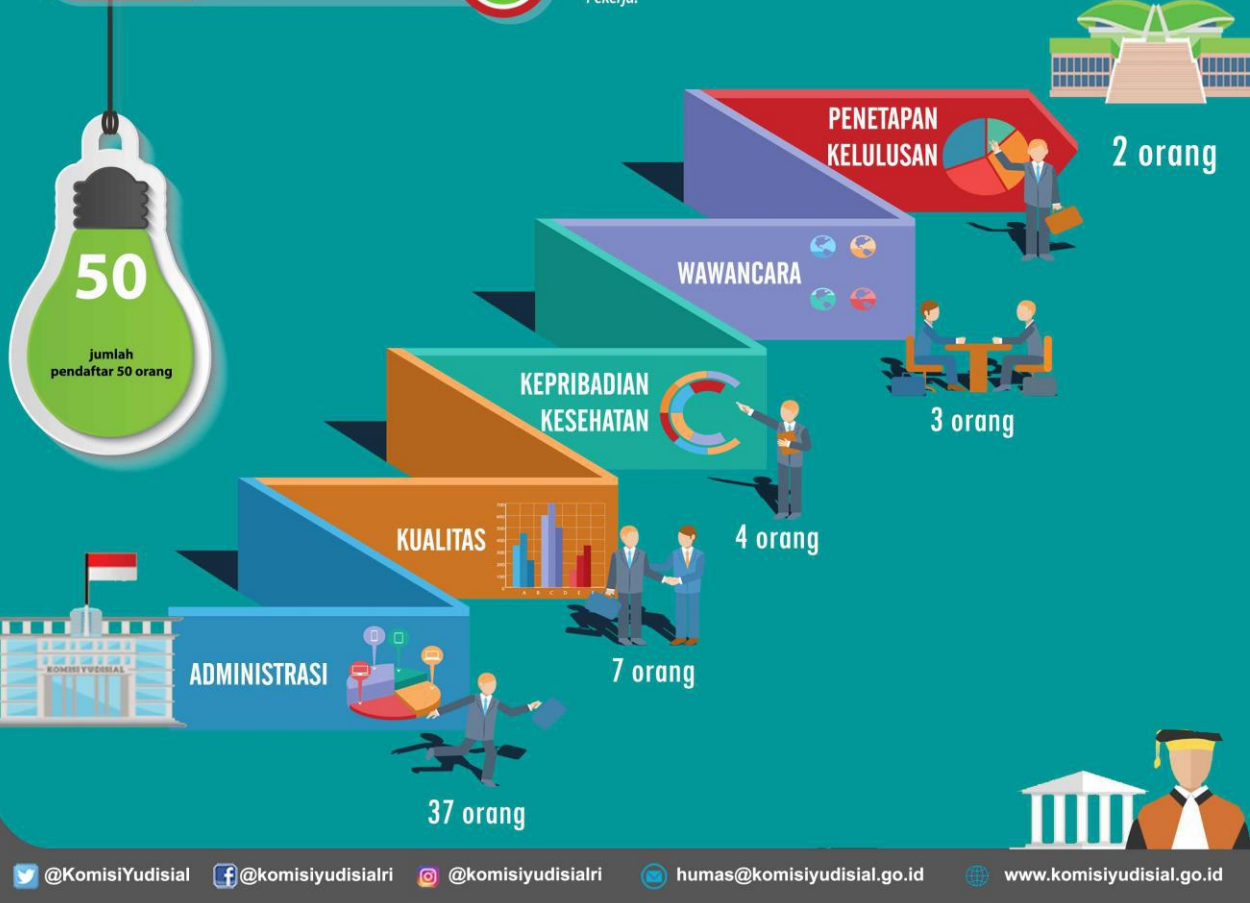
KY USULKAN 2 CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR KE DPR

3

Jumlah Kebutuhan

3 (tiga) Hakim Ad Hoc Tipikor
pada Mahkamah Agung

Seleksi calon hakim agung dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Surat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019. Surat tersebut merevisi surat sebelumnya sehingga kekosongan hakim agung dan hakim ad hoc di MA menjadi 11 (sebelas) Hakim Agung yang terdiri: 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Pidana, 4 (empat) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, 1 (satu) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 2 (dua) Hakim Agung Kamar Militer; 3 (tiga) Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung; dan 6 (enam) Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang terdiri dari 3 (tiga) unsur APINDO dan 3 (tiga) unsur Serikat Buruh/Serikat Pekerja.



PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR



Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 19 November 2019, dihasilkan 6 (enam) calon hakim agung, 2 (dua) calon hakim ad hoc Tipikor pada MA dan 2 (dua) calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA di bawah ini dinyatakan lulus seleksi wawancara yang akan dimintakan persetujuan kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim ad hoc Tipikor adalah sebagai berikut:

Ansori, S.H., M.H

Sidoarjo, 13 April 1969

Jabatan: Hakim Ad Hoc Tipikor
Tingkat Banding Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah

Profesi : Hakim Ad Hoc
Pendidikan Terakhir: Magister



Dr. Agus Yuniarto, SH., MH.

Bandung, 26 Juni 1966

Jabatan: Hakim Ad Hoc Pengadilan
Tipikor Tingkat Pertama
pada PN Surabaya

Profesi : Hakim Ad Hoc
Pendidikan Terakhir: Doktor



KY USULKAN 2 CALON HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL KE DPR

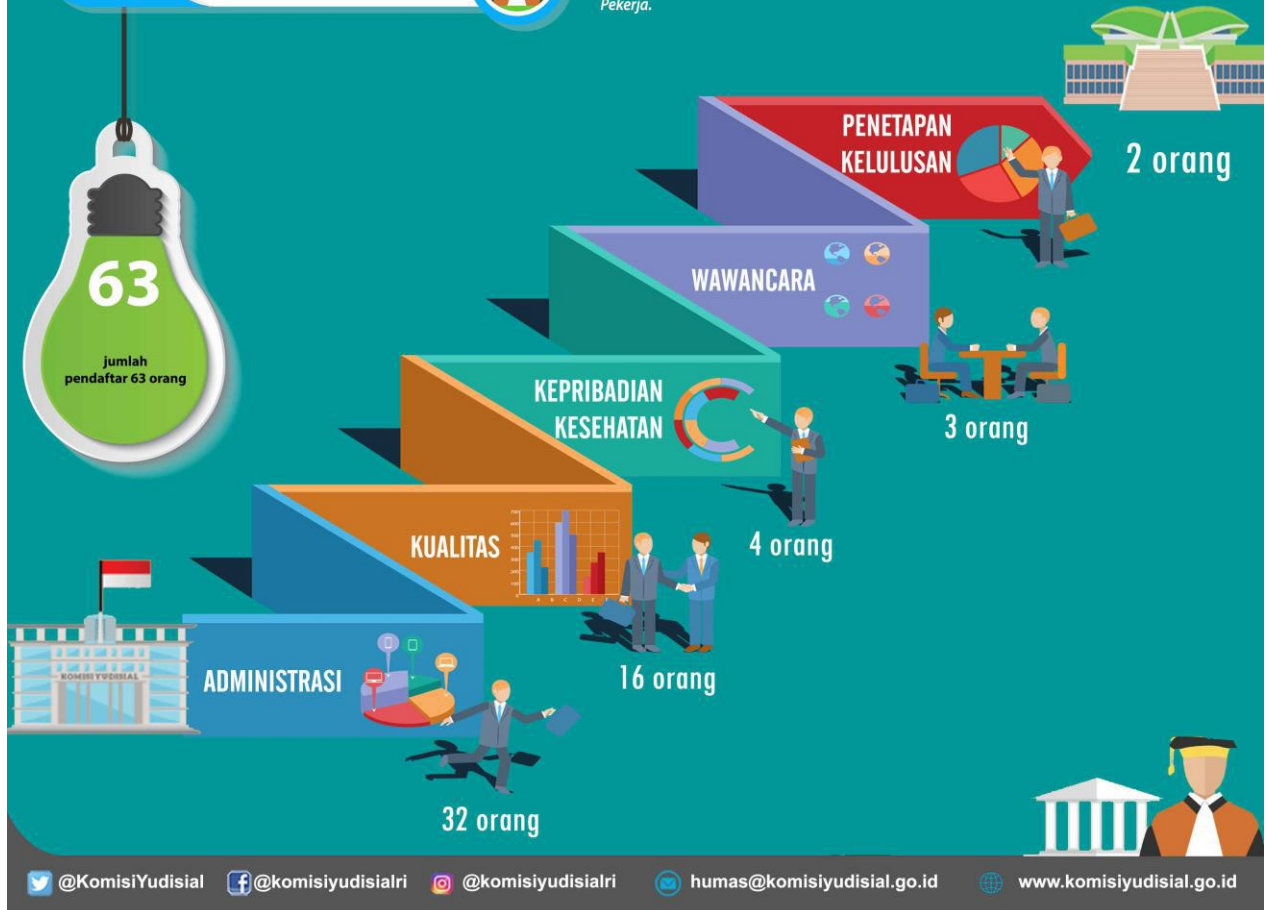
6

Jumlah Kebutuhan

- 3 (tiga) unsur APINDO
- 3 (tiga) unsur Serikat Buruh /Serikat Pekerja



Seleksi calon hakim agung dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Surat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019. Surat tersebut merevisi surat sebelumnya sehingga kekosongan hakim agung dan hakim ad hoc di MA menjadi 11 (sebelas) Hakim Agung yang terdiri: 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Pidana, 4 (empat) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, 1 (satu) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 2 (dua) Hakim Agung Kamar Militer; 3 (tiga) Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung; dan 6 (enam) Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang terdiri dari 3 (tiga) unsur APINDO dan 3 (tiga) unsur Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

Jumlah
pendaftar 63 orang

PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR



Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 19 November 2019, dihasilkan 6 (enam) calon hakim agung, 2 (dua) calon hakim ad hoc Tipikor pada MA dan 2 (dua) calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA di bawah ini dinyatakan lulus seleksi wawancara yang akan dimintakan persetujuan kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim ad hoc Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

Dr. Willy Farianto, S.H., M.Hum.

Banyumas, 30 Juni 1975

Jabatan: Partner Fardalaw/ Dosen
Tidak tetap HK Perburuhan FH UPN
Veteran Jakarta/ Fasilitator/Dosen
Hubungan Industrial

Profesi: Advokat dan Dosen
Pendidikan Terakhir: Doktor



Sugiyanto, SH., MH.

Semarang, 20 Maret 1965

Jabatan: Hakim Ad Hoc PHI pada
Pengadilan Negeri Semarang
Profesi: Hakim Ad Hoc

Agama: Islam
Pendidikan Terakhir: Magister

